ISSN: 2303-3169
VOL. 7 Edisi: 1 Januari-Juni Tahun 2017

JISPO

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

ANALISIS KEBUTUHAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (LITBANG) DI KABUPATEN BANDUNG
Rizki Hegia Sampurna & Irwandi

MENINGKATKAN KEUNGGULAN BERSAING USAHA KECIL DAN MENENGAH (Upaya Meninkatkan Kesejahteraan Mayarakat)
R. Deni Muhammad Danial

PROMOSI UNIVERSITAS SWASTA DALAM MENARIK MINAT MAHASISWA BARU (Studi Kasus Promosi UPT HPPMB Universitas Muhammadiyah Sukabumi)
Itsna Nurhayati & Andi Mulyadi

NEGARA SEKULAR - ISLAM (Deskripsi Padangan Dr. Muhammad Syahrur Mengenai Hubungan Syura, Demokrasi dan Negara dalam Islam)
Iir Abdul Haris

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TRADISIONAL MASYARAKAT DAERAH SEBAGAI PENYANGGA HUTAN UNTUK PELESTARIAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK (TNGHS)
Agus Rusmana, Edwin Rizal, Ute Lies Khadijah dan Rully Khairul Anwar

ENTREPRENEURIAL EDUCATION DAN *ENTREPRENEURIAL INTENTION*: *SOCIAL SUPPORT* SEBAGAI MODERASI VARIABEL
Yulia Fithriyani Rahmah

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HIMBAUAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI
Dine Meigawati & Melawati

ADMINISTRASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI
Engkus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung

JISPO Vol. 7 Edisi: 1, Hlm. 1-88 Bandung, Januari-Juni 2017

JISPO

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

PENANGGUNGJAWAB
Sahya Anggara

PENGARAH
Encup Supriatna
Muhamad Zuldin
Hamzah Turmudi

PENYUNTING AHLI
Endang Soetari Ad. (UIN SGD Bandung)
Ali Munhanif (UIN Syahid Jakarta)
Carol Kersten (King College, London)
Supraja (UGM Yogyakarta)

DEWAN PENYUNTING
Ketua : Moh. Dulkiah
Anggota : M. Taufiq Rahman
Muhamad Zaky
Abdal
Heldi

SEKRETARIAT
Ketua : Rizki Hegia Sampurna
Anggota : Irwandi
Jalildin Muslim

LAY OUT
Avid Leonardo Sari

ALAMAT REDAKSI:
Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung, 40614
Telp. (022) 7811918 Fax. (022) 7811918
E-mail: jispouin@yahoo.com

DAFTAR ISI

Rizki Hegia Sampurna & Irwandi
1-12

R. Deni Muhammad Danial
13-21

Itsna Nurhayati & Andi Mulyadi
22-29

Iir Abdul Haris
30-41

Agus Rusmana, dkk.
42-65

Yulia Fithriyani Rahmah
66-74

Dine Meigawati & Melawati
75-82

Engkus
83-93

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISPO) diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung setiap enam bulan sekali (Januari dan Juli). JISPO merupakan jurnal ilmiah yang menyajikan tulisan hasil penelitian dan kajian bidang sosial dan politik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HIMBAUAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DI BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA SUKABUMI

Abstract

This study aimed to analyze the implementation of policies call for diversification of food consumption in the Field of Food Security Sukabumi. In addition this study analyzes the factors that become supporters and obstacles in implementing it. These results indicate that the implementation of the policy of diversification of food consumption appeal has not been carried out effectively and efficiently. But the main factors that hinder the realization of this policy were in consumption patterns are always dependent on rice. Based on the analysis and discussion, the researchers conclude that the implementation of policies in the field of food appeal penganekaraaman Food Security Sukabumi is not operating effectively and efficiently.

Key words: Implementation, Policy, Security, Food

Dine Meigawati & Melawati
dinemeigawati@gmail.com

Dosen dan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

A. Pendahuluan

Walikota Sukabumi mengeluarkan surat edaran dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Hal tersebut dihimbau untuk segera melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan dengan menyediakan makanan ringan atau snack berbahan baku lokal, non beras dan non terigu dalam setiap kegiatan pertemuan atau rapat-rapat dinas yang sehari-hari dilakukan, kemudian dihimbau melaksanakan program *"One Day No Rice"* tidak mengkonsumsi nasi dalam satu hari yang dilaksanakan setiap hari kamis sebagai contoh baik untuk masyarakat, dan turut serta mensosialisasikan penganekaragaman pangan lokal dalam rangka meningkatkan daya saing dan menjadikan pangan lokal sebagai "Tuan Rumah di Negerinya".

Sejauh ini dari adanya himbauan Walikota, belum ada perkembangan secara signifikan bahwa kebijakan itu sudah berjalan secara efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat selaku sasaran utama dari kebijakan tersebut belum bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran masyarakat juga belum memahami bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang merupakan salah satu faktor penentu kualitas sumberdaya manusia. Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang kurang beranekaragam yang akan berdampak pada timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih.

Disamping itu, kondisi sumberdaya lokal yang tidak memadai, contohnya saja seperti lahan sawah yang semakin berkurang, sehingga ketersediaan pangan lokal masih mengandalkan distribusi dari tempat lain. Peran pemerintah sebagai implementor dari kebijakan tersebut berusaha mencari jalan keluar dengan cara mensosialisasikan pemanfaatan lahan sawah bagi yang memiliki untuk ditanami pangan lokal seperti jagung, ubi, talas, dan lain- lain serta bagi yang tidak memiliki lahan sawah disarankan untuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pangan lokal maupun sayuran dan rempah-rempah dengan cara menggunakan pipa.

Keanekaragaman serta cakupan pangan di Kota Sukabumi masih merupakan masalah yang harus kita hadapi saat ini dan masa yang akan datang. Sampai saat ini bahan pokok utama yang masih dikonsumsi bertumpu pada beras, hal tersebut sulit diterapkan karena sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Sebagian kecil penduduk Kota Sukabumi mengkonsumsi pangan pokok non beras seperti jagung atau komoditi lainya (singkong). Kecenderungan saat ini adalah masih banyaknya masyarakat bertumpu pada bahan pangan beras bahkan terigu yang bukan komoditi pangan lokal tetapi merupakan bahan pangan import, sehingga persoalan kecukupan pangan dan ketahanan pangan sangat rendah.

Berbagai cara yang dilakukan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan dilakukan bertujuan bahwa minimal masyarakat peduli terhadap gizi, import beras dan memahami pentingnya penganekaraaman pangan. Namun yang terjadi masih banyaknya masyarakat yang mengetahui namun tidak menerapkan hal tersebut, serta penyampaian informasi yang diwakili oleh kader atau tokoh masyarakat yang tidak disampaikan kembali kepada msyarakat yang tidak menghadiri sosialisasi tersebut. Faktor kebiasaan terhadap nasi dan kemalasan untuk menanam dengan memanfaatkan lahan tidak dipungkiri lagi karena *mindset* masyarakat yang berpikir bahwa sudah ada yang *instan* mengapa harus repot-repot membuat yang sulit. Schingga implentasi tersebut sulit diterapkan.

Ketergantungan pangan dari impor dan ketidakmampuan suatu bangsa mencapai kemandirian pangan akan menyebabkan ketahanan nasional terganggu. Secara umum, Indonesia masih merupakan negara importir pangan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini kita kembali menjadi importir pangan, walaupun pada orde baru setelah tahun 1984 berhasil mencapai swasembada beras. Namun pada tahun 1998 kembali mengalami

krisis pangan. Impor beras bahkan pernah mencapai puncaknya pada tahun 1998 sebesar 5,8 juta ton, dan 4 juta ton pada tahun 1999 yang membuat Indonesia menjadi importir beras terbesar di dunia. Indonesia juga masih rutin menjadi importir gula dengan tingkat ketergantungan pada impor mencapai 30% dan pernah menjadi nomor dua importir terbesar didunia setelah Rusia. Padahal kita pernah menjadi eksportir gula terbesar kedua didunia pada tahun 1930-an.

Reformasi politik di Indonesia, pangan bertujuan menciptakan rancang bangun politik pangan yang lebih baik, sehingga melahirkan: "Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal". Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan berbagai fenomena masalah yaitu komunikasi yang dilakukan Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi belum berjalan ekeftif baik intern maupun ekstern. Hal demikian dicontohkan dengan kurangnya koordinasi antar pegawai serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman akan pentingnya keragaman pangan yang belum maksimal terpenuhi. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan seminar khusus mengenai ketahanan pangan serta saat kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Sosialisasi tesebut ditujukan kepada perwakilan tokoh masyarakat dan OPD di Kota Sukabumi.

Namun pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang pentingnya penganekaragaman pangan, serta masih banyak dinas dinas di Kota Sukabumi yang belum menerapkan kebijakan tersebut khususnya di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi. Sumber daya Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi belum memadai dikarenakan sumber daya pegawainya masih kekurangan pegawai 2 orang. Sikap para pegawai mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih ragu namun terus berusaha dijalani dikarenakan himbauan Walikota Sukabumi yang harus ditindaklanjuti dan segera dilaksanakan, dilihat dari Kepegawaian, Bidang Ketahanan Pangan masih kurangnya pegawai sehingga terjadinya tumpang tindih pekerjaan serta kerjasama dan koordinasi masih kurang terjalin.

Fokus masalah dari penelitian ini mengenai Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi beserta faktor-faktor penghambat dan pendukungya.

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi?
b. Apa faktor-faktor penghambat serta pendukungnya dari implementasi kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi?

B. Tinjauan Pustaka

Secara sederhana implementasi bisa diartikan sebagai penerapan/pelaksanaan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Jadi Implementasi kebijakan publik merupakan upaya untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Tachjan 2006:xii).

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang mengandung konsekuensi moral yang didalamnya adanya keterikatan akan kepentingan rakyat banyak dan keterikatan terhadap tanah air atau tempat dimana yang bersangkutan berada. Hal ini seyogyanya direfleksikan dalam perilaku aparat sebagai penyelenggara, dan adanya interaksi antara penguasa dengan rakyat. Maka pertanggung jawaban dari seorang administrator publik adalah mencakup pertanggung jawaban birokratis, pertanggung jawaban legal, pertanggung jawaban profesional, pertanggung jawaban politis, dan pertanggung jawaban religius.

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: "(1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups" (Abdullah & Smith dalam Tachjan, 2000:26).

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai suatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (Edward:1980), dipengaruhi oleh 4 variabel yaitu:

a. Komunikasi;
b. Sumber daya;
c. Disposisi;
d. Struktur birokrasi;

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

a. Tujuan yang akan dicapai
b. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai
c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan
d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial
f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

Karakter utama dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan.
b. Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif.

mampu menerapkan kebijakan serta program-program tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Edward III mengkategorikan sumberdaya organisasi terdiri dari staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

Sumber daya pegawai bidang ketahanan pangan belum memenuhi Standar dan belum seimbang. Hal ini dibuktikan dengan pendapat dari Kepala Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi bahwa:

> "pegawai disini terdapat 7 orang pegawai Bidang ketahanan Pangan. Pegawai belum mencukupi karena dari segi tugas dan beban belum memadai. Namun dari sisi pemerintah diharuskan ramping tapi kaya akan kualitas, wilayah kota lebih sedikit dibanding kebupaten dengan jumlah penduduk di kota sekitar 300.000 lebih jadi antar pegawai dan masyarakat memang tidak seimbang namun insha allah dimaksimalkan".

3. Disposisi

Sikap para pegawai mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut masih ragu namun selalu berusaha dijalani. Bidang Ketahanan Pangan dan seluruh OPD yang terkait selalu menganggap kebijakan ini sangatlah penting untuk diterapkan, namun keyakinan akan keberhasilan kebijakan tersebut masih diragukan karena sulitnya menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap penganekaragaman pangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Dilihat dari Struktur Kepegawaian Bidang Ketahanan Pangan masih kekurangan pegawai 2 orang, sehingga masih terjadinya tumpang tindih pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh 2 orang tersebut, serta kerjasama dan koordinasi masih kurang terjalin. Kepala bidang Ketahanan Pangan mengungkapkan "setiap seksi kurang terfokus terhadap penganekaragaman konsumsi pangan ini, karena mereka mempunyai tugas masing-masing yang harus diselesaikan". Dari pendapat ini peneliti menginterpretasikan bahwa kurang kerjasamanya terhadap himbauan penganekaragaman pangan dikarenakan masing-masing lebih memfokuskan pada tugas yang lain.

E. Kesimpulan dan Saran

Implementasi Kebijakan Himbauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi belum berjalan sesuai dengan harapan. Dikarenakan terdapat empat faktor yang mempengaruhi terhambatnya implementasi tersebut yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi yang saling berhubungan satu sama lainnya dan berkaitan secara stimulan. Faktor yang paling berperan dan menghambat adalah faktor komunikasi yang masih kurang dijalani oleh pihak Bidang Ketahanan Pangan Kota Sukabumi.

Adapun saran peneliti agar terciptanya keragaman konsumsi pangan di Kota Sukabumi adalah:

a. Dibuatnya perda sebagai acuan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan.
b. Menerapkan dan mentertibkan program penganekaragaman pangan dan *One Day No Rice* guna membantu pemerintah dalam meminimalisir import beras.
c. Melakukan sosialisasi secara merata dan kerjasama antar pegawai Bidang Ketahanan Pangan ebih ditingkatkan dalam kebijakan penganekaragaman konsumsi pangan.
d. Membuat program yang menjadi daya tarik masyarakat terhadap penganekaragaman konsumsi pangan.

F. Daftar Pustaka

Mulyana, Dedi. 2000. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Rosda.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2006. *Metode penelitian administrasi*. Bandung: Alfabeta

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: 2012.

Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* Bandung: Alfabeta.

Wibowo. 2012. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Syafiie, Inu. Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Bandung: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta

Edward, George, C. 1980. *Implementing Public Policy*. Amerika: Congressional Quarterly Press.

Dunn, William, C. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Keban, Yeremias, C. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*. Yogyakarta: Gaya Media.

Kusumadinata, Ersan. (2013). Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Skripsi Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi: tidak diterbitkan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1996 tentang pangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2009 Tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

http://agoesman120.wordpress.com/2009/06/27/pangan-lokal/
http://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/01/26/tinjauan-teoritis-implementasi kebijakan-publik/
http://forester rimbawan.blogspot.com/2009/05/model-model-implementasi kebijakan.html
http://pesantrencampoes.wordpress.com/2013/08/09/metode penelitian-kualitatif/